



RKPD 2012

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA MATARAM TAHUN 2012**

**PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2012

ABSTRAK

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011–2015 yang merupakan rencana pembangunan dari Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram terpilih periode 2010-2015. RPJMD Kota Mataram 2011-2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011. Penyusunan RKPD Tahun 2012 ini juga mengacu kepada: 1) substansi tahapan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005– 2025; 2) substansi tahapan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 dan 3) substansi tahapan RPJMN Tahun 2010-2014.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah, RKPD memuat (1) rancangan kerangka ekonomi daerah yang terdiri dari gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, (2) program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan, dan (3) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun anggaran yang direncanakan.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. RKPD Kota Mataram Tahun 2012 merupakan tahapan pelaksanaan RPJMD Kota Mataram 2011-

2015. Tahapan RPJMD ini merupakan tahapan yang penting untuk menjamin konsistensi target dan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

RKPD Kota Mataram Tahun 2012 disusun dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kota Mataram, sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan yang relatif masih menjadi beban bagi masyarakat miskin, adanya ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta belum meratanya daya tampung setiap sekolah.
2. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat yang berdampak rendahnya status kesehatan penduduk terutama penduduk kurang mampu, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pemerataan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
3. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk usia kerja dengan penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan keperluan pasar kerja.
4. Rendahnya akses Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) pada sumberdaya produktif, permodalan, keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya daya saing produk, serta rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.
5. Lahan pertanian yang semakin sempit dan kualitas SDM petani yang masih rendah, dan belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian.
6. Rendahnya pendapatan nelayan dan produktivitas tangkapan ikan, serta belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil perikanan.
7. Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kelas serta fungsi jalan.
8. Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air lainnya sehingga sering terjadi genangan akibat menurunnya kapasitas saluran drainase yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Disamping itu, masih terdapat talud sungai dan tanggul pengaman pantai yang mengalami kerusakan sebagai akibat banjir/genangan, longsor dan abrasi pantai.
9. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan karena terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan.
10. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.

11. Meningkatnya volume produksi sampah dan menurunnya kapasitas pengangkutan sampah, serta terbatasnya pengelolaan sampah.

Permasalahan diatas dilihat dari pendekatan berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu (a) Aspek geografis dan demografi; (b) Aspek kesejahteraan rakyat; (c) Aspek pelayanan dan (d) Aspek daya saing.

Keseluruhan permasalahan diatas akan ditangani dalam perwujudan implementasi program-program prioritas yang dipertajam dalam 3 program unggulan Kota Mataram yaitu program 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong daya saing daerah, 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, dan 3) Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Untuk menjawab permasalahan pembangunan diatas, Pemerintah Kota Mataram memiliki sejumlah peluang pembangunan sebagai berikut: Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE), pelimpahan kewenangan pusat ke daerah dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah (pajak/retribusi), peluang tersedianya dana-dana pusat dan provinsi yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan di Kota Mataram, dan daya tarik investasi di sektor jasa dan perdagangan oleh sektor swasta sebagai daya dukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Keseluruhan permasalahan dan peluang yang ada dapat mempengaruhi proses dan pencapaian kinerja pembangunan Kota Mataram, sehingga perlu untuk terus meningkatkan kualitas pembangunannya dalam rangka pencapaian visi "***Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya***".

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012	-
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA RKPD	5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010	6
2.1. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	6
2.1.1 INDIKATOR MAKRO EKONOMI	7
2.1.1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTTO	7
2.1.1.2 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	8
2.1.1.3 LAJU INFLASI	9
2.1.1.4 TINGKAT PENGANGGURAN	10
2.1.2 INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN LAINNYA	10
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2010 DAN REALISASI RPJMD	13
2.2.1 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING	13
2.2.2 PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI EKONOMI LOKAL	16
2.2.3 PENINGKATAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PER	18
2.2.4 AKUNTABILITAS ANGGARAN	21
2.3. ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK RKPD 2012	22
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN	25
3.1. KONDISI EKONOMI KOTA MATARAM TAHUN 2010 (TAHUN LALU) DAN TAHUN 2011 (TAHUN BERJALAN)	25
3.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2012	28
3.3. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2012	30

3.4.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2012	33
3.4.1	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2010, PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011, DAN ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2012	33
3.4.2	ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35
3.4.3	ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	36
3.4.4	ARAH KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012	40
4.1.	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PUSAT, PROVINSI NTB DAN KOTA MATARAM	40
4.2.	PRIORITAS DAN SASARAN TIGA PROGRAM UNGGULAN KOTA MATARAM	44
4.2.1	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012	44
4.2.2	SASARAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012	45
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012	55
5.1.	URUSAN WAJIB	55
5.2.	URUSAN PILIHAN	86
BAB VI	PENUTUP	94

DAFTAR ISTILAH

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
20. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
27. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka teknis penyusunan, RKPD Kota Mataram Tahun 2012 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, termasuk di dalamnya gambaran tentang rencana prioritas, isu serta masalah mendesak yang segera perlu diselesaikan. RKPD disusun dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2012 ini merupakan tahapan kedua RPJMD Kota Mataram 2011-2015. Untuk itu, penyusunan RKPD Kota Mataram 2012 ini mengacu kepada: 1) substansi tahapan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005–2025; 2) substansi tahapan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 dan 3) substansi tahapan RPJMN Tahun 2010-2014.

Selanjutnya, sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah yang bersifat taktis strategis dengan perencanaan penganggaran tahunan daerah yang bersifat teknis operasional. Sebagai rencana pembangunan tahunan, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya melalui tahapan proses Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM), antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan (*stakeholders*), tingkat keterdesakan penanganan masalah pembangunan, serta dinamika perkembangan lingkungan strategis sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 merupakan tahapan tahunan pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun Kota Mataram tahun 2011–2015. RKPD merupakan dokumen yang mencerminkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2012 dalam bentuk program-program pembangunan daerah yang akan diimplementasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui serangkaian pelaksanaan forum-forum perencanaan, sebagai berikut:

- a. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada minggu IV bulan Januari sd. Minggu ke II bulan Februari 2011.
- b. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kecamatan dilaksanakan minggu ke III Bulan Februari 2011.
- c. Forum Gabungan SKPD dilaksanakan pada minggu I Bulan Maret 2011.
- d. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kota dilaksanakan pada minggu ke II bulan Maret 2011.
- e. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2012.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2012 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025.
25. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2010-2015.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kota Mataram Tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan Arah, Kebijakan Umum dan Prioritas pembangunan daerah. Selain itu RKPD juga sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan program dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing SKPD dalam rangka mewujudkan percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses pengembangan ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat, serta pencapaian tujuan pelayanan publik.

Tujuan dari penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengatasi permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang optimal.

1.4. SISTEMATIKA RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012
BAB VI	PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010

2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan

Evaluasi mencakup telaahan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 (tahun lalu). Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2010 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat capaian perencanaan yang telah dituangkan dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2010, yang tercermin dalam pencapaian beberapa indikator tingkat pencapaian pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator yang ditujukan untuk menilai apakah pembangunan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk itu Pemerintah Kota Mataram terus melakukan kajian hasil-hasil pembangunan dengan mengevaluasi indikator kemajuan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ketiga indikator ini secara umum telah digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 ini memuat evaluasi terhadap kemajuan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2010, serta evaluasi berjalan terhadap tahapan RPJMD Kota Mataram 2010-2015. Evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan untuk menentukan langkah-langkah dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan kondisi capaian terkini, dan proyeksi terhadap target capaian pada tahapan-tahapan selanjutnya.

2.1.1 Indikator Makro Ekonomi

2.1.1.1 Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

PDRB Kota Mataram, pada triwulan IV-2010, PDRB yang dihitung atas dasar harga (Adh) berlaku mencapai Rp. 1,241 triliun, sedangkan perhitungan Adh konstan mencapai Rp. 573,9 milyar rupiah.

Tabel 2.1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram
Tahun 2008-2010

Lapangan Usaha	2008		2009		2010 *)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian	164.891,34	4,55	173.741,72	4,20	47.968,60	3,86
Pertambangan dan Penggalian	1.420,30	0,04	895,85	0,02	202,34	0,02
Industri Pengolahan	366.763,72	10,12	430.190,96	10,39	149.397,72	12,04
Listrik, Gas & Air Bersih	40.374,79	1,11	47.488,46	1,15	9.338,19	0,75
Bangunan	276.117,54	7,62	346.163,59	8,36	115.958,24	9,34
Perdagangan Hotel & Restoran	710.506,66	19,60	825.078,54	19,93	230.381,20	18,56
Pengangkutan & Komunikasi	1.101.329,59	30,39	1.192.868,40	28,81	351.526,18	28,32
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	552.271,19	15,24	634.041,99	15,31	196.878,95	15,86
Jasa-Jasa	410.662,71	11,33	489.883,15	11,83	139.500,75	11,24
Jumlah	3.624.337,84	100	4.140.352,66	100	1.241.152,17	100

*) data pada Triwulan IV tahun 2010.

Sumber: BPS Kota Mataram, 2011

Leading sector perekonomian Kota Mataram pada triwulan IV-2010 dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 28,32 persen terhadap PDRB. Sementara sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 18,56 persen. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor keuangan, jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan, masing-masing sebesar 15,86 persen dan 12,04 persen. Sektor yang mempunyai kontribusi terkecil sebesar 0,02 persen adalah sektor pertambangan dan penggalian disusul oleh sektor listrik, gas, dan air bersih 0,75 persen.

Tabel 2.2.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha
di Kota Mataram Tahun 2008-2010

Lapangan Usaha	2008		2009		2010 *)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Pertanian	85.261,08	4,56	85.619,41	4,22	22.039,95	3,84
Pertambangan & Penggalian	816,40	0,04	473,51	0,02	92,67	0,02
Industri Pengolahan	223.162,45	11,93	248.156,64	12,23	68.424,96	11,92
Listrik, Gas & Air Bersih	14.362,85	0,77	15.512,74	0,76	4.622,51	0,81
Bangunan	159.674,58	8,53	184.583,82	9,09	53.084,84	9,25
Perdagangan Hotel & Restoran	347.069,32	18,55	383.095,82	18,87	111.314,47	19,39
Pengangkutan & Komunikasi	516.306,21	27,59	549.819,28	27,09	164.903,21	28,73
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	307.676,60	16,44	333.532,18	16,43	85.591,57	14,91
Jasa-Jasa	216.870,51	11,59	228.868,58	11,28	63.892,10	11,13
JUMLAH	1.871.200,00	100,00	2.029.661,98	100,00	573.966,28	100,00

*) data sangat sementara pada Triwulan IV tahun 2010.

Sumber: BPS Kota Mataram, 2011.

Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada periode 2009-2010 berkisar antara 7-8 % per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini dalam prakteknya dapat dilihat dengan meningkatnya pendirian supermarket, pusat perbelanjaan, aktivitas transportasi dan pembangunan perumahan di segala penjuru wilayah Kota Mataram. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram juga mampu meningkatkan geliat kegiatan pembangunan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi pada tingkatan yang relatif tinggi di berbagai bidang termasuk peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di Kota Mataram.

2.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan sesuai dengan yang ditargetkan.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram sedikit banyak pasti terpengaruh dengan situasi perekonomian provinsi dan perekonomian nasional. Perekonomian Kota Mataram pada triwulan IV-2010 tumbuh sebesar 0,10 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2010 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negative sebesar -1,54 persen dari pertumbuhan pada triwulan III-2010.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kuartal (*q to q*), yakni perbandingan PDRB triwulan IV-2010 terhadap PDRB triwulan III-2010 mengalami pertumbuhan positif meskipun relatif kecil yakni sebesar 0,10 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar adalah sektor bangunan sebesar 7,85 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kumulatif (*c to c*) , yaitu PDRB triwulan I sampai dengan triwulan IV secara kumulatif tahun 2010 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 7,9 persen. Ini berarti Kota Mataram mengalami peningkatan namun tidak secepat pada tahun 2009 yang mengalami pertumbuhan 8,47 persen. Secara umum, sektor industri pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa, serta sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat sebaliknya sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

2.1.1.3 Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram diikuti dengan meningkatnya laju inflasi, hal ini perlu diwaspadai agar laju inflasi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan besaran pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. Laju inflasi di Kota Mataram mengalami penurunan dari 13,29% pada tahun 2008 menjadi 3,14% pada tahun 2009, namun demikian pada tahun 2010, laju inflasi Kota Mataram naik menjadi 7,48%.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kota Mataram Tahun 2008-2010

No.	Uraian	2008	2009	2010 *)
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan PDRB	7,76%	8,47%	7,9%
2.	Laju Inflasi	13,29%	3,14%	11,07%

*) data sangat sementara pada Triwulan IV tahun 2010.

Sumber: BPS Kota Mataram, 2010

2.1.1.4 Tingkat Pengangguran

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Salah satu indikator yang dipakai dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap di lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah akan menggerakkan perekonomian di suatu daerah tersebut. Apabila hal sebaliknya terjadi, dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial.

Masalah ketenagakerjaan mengandung dua aspek yaitu penyediaan lapangan kerja/usaha dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Kota Mataram sebesar 10,78% pada tahun 2009. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 11,89%. Mengingat masih tingginya angka pengangguran, maka harus terus diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan. Bergesernya lapangan pekerjaan penduduk 10 tahun ke atas dari sektor pertanian ke sektor industri, dan perdagangan, mengindikasikan bahwa Kota Mataram menuju perekonomian modern.

2.1.2. Indikator Makro Pembangunan Lainnya

Indikator makro untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya melihat faktor ekonomi makro semata, melainkan diukur juga dengan aspek pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan tentang

capaian secara riil terhadap aktivitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dari sisi IPM data-data tentang capaian Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Uraian	2009	2010 *)
Rasio Lama Sekolah (RLS)	9.50 tahun	9.50 tahun
Angka Harapan Hidup (AHH)	66.00 tahun	66.6 tahun
Angka Melek Huruf (AMH)	95.50 %	95.50 %
Paritas Daya Beli	Rp. 642.170	Rp. 642.170
IPM	72.55	72.99

*) data sementara.

Sumber: BPS Kota Mataram, 2010

Tingkat pencapaian pembangunan suatu daerah dapat diukur pula dari tingkat pelayanan publik. Pelayanan publik yang umumnya digunakan dalam mengukur keberhasilan adalah pelayanan dasar, diantaranya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana perkotaan. Ketiga pelayanan dasar tersebut adalah indikator yang dapat mewakili pengukuran keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan pembangunan.

Indikator pendukung keberhasilan pembangunan lainnya dapat diketahui dengan melihat jumlah persentase prevalensi gizi buruk, jumlah penduduk miskin, serta luas kawasan kumuh, luas jangkauan pelayanan persampahan, kondisi jalan dan cakupan layanan air bersih yang langsung bersentuhan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Indikator Makro Pembangunan Lainnya

Uraian	2009	2010*)
Prevalensi Gizi Buruk	0,04%	0,04%
Penduduk Miskin (KK)	37.043	37.043
Luas Kawasan Kumuh	201,50 Ha	201,50 Ha
Luas Jangkauan Pelayanan Persampahan	4.904 ha	4.904 ha
Kondisi Jalan Baik	245,95 km	207,16 km
Cakupan Layanan Air Bersih	60.79 %	68.29%

*) data sementara.

Sumber: BPS Kota Mataram, 2010

Pertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan pembangunan dibidang lain seperti bidang kesehatan dan pendidikan tidak akan banyak bermanfaat. Karena itu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus juga meningkatkan indikator di bidang kesehatan dan pendidikan. Kaitan antara indikator di bidang kesehatan dan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang timbal balik, disatu pihak penyediaan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan memerlukan pertumbuhan ekonomi dan di lain pihak status kesehatan dan pendidikan penduduk menentukan tingkat produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indikator kesehatan dan pendidikan yang meliputi Angka Melek Huruf (AMH), Usia Harapan Hidup (AHH), Angka Rata-rata lama sekolah (ALS) mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir ini. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan representasi kemajuan dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan dari 72,55 (tahun 2009) menjadi 72,99 (tahun 2010).

Indikator makro pembangunan daerah menunjukkan tingkatan pencapaian atas hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui besaran kemajuan pembangunan di Kota Mataram di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, fisik dan prasarana sarana perkotaan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan pengukuran dan analisis capaian kinerja kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Mataram secara umum dapat dikatakan **berhasil** melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja kegiatan pembangunan sebesar 100% dan kinerja keuangan mencapai **87,26%**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Mataram dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 613.908.356.328,- jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 535.677.233.709. Dengan demikian terdapat sisa dana yang belum terealisasi sebesar Rp 78.231.122.619 atau sekitar 13,74 % merupakan dana luncturan pada tahun berikutnya yaitu 2011 Keberhasilan tersebut juga sangat didukung oleh kinerja seluruh aparatur pemerintah Kota Mataram dalam mengimplementasikan sistim akuntabilitas kinerja pemerintah dengan baik.

Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Mataram ini tidak terlepas dari permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Namun permasalahan ataupun kendala yang ada dapat diminimalisir dengan baik melalui evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak melenceng dari apa yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Mataram 2006-2010 dan RKPD tahun 2010.

Adapun capaian kinerja masing-masing program unggulan pada tahun anggaran 2010 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan daya saing

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam prioritas peningkatan kualitas SDM ialah peningkatan kualitas SDM yang bertujuan menghasilkan generasi yang sehat, terdidik dan berproduktivitas kerja yang tinggi.

Permasalahan yang dihadapi program unggulan peningkatan kualitas SDM dalam rangka mendorong daya saing daerah pada tahun 2010, antara lain:

1. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, adanya ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta belum meratanya daya tampung setiap sekolah.
2. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat yang berdampak rendahnya status kesehatan penduduk terutama penduduk kurang mampu, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat kontrasepsi yang diminati.
3. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dengan penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan keperluan pasar kerja.

Pencapaian sasaran peningkatan kualitas SDM pada tahun 2010 telah dilakukan melalui:

No	Sasaran	Evaluasi capaian
1	Peningkatan Kualitas Sektor Pendidikan.	Angka Melek Huruf (AMH) : 95,50% Rasio Lama Sekolah (RLS) : 9,50 Angka Partisipasi Kasar (APK): - SD/MI/Paket A : 108,98 - SMP/MTs/Paket B : 101,66. - SMA/SMK/MA/Paket C: 101,64 Angka Partisipasi Murni (APM): - SD/MI/Paket A : 97,50 - SMP/MTs/Paket B : 76,64 - SMA/SMK/MA/Paket C: 71,79
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.	Angka Harapan Hidup (AHH): 66,6 Angka Kematian Ibu (kasus): 7 Angka Kematian Bayi (kasus): 29 Gizi Buruk (kasus): 41 Cakupan layanan Puskesmas: 100%
3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.	Partispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 80%.

Dalam bidang pendidikan pada tahun 2010 mengalami kemajuan cukup menggembirakan dengan pelaksanaan berbagai macam program pembangunan pendidikan, walaupun terdapat berbagai permasalahan. Kemajuan ini membawa dampak semakin meningkatnya kualitas proses belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya berbagai program peningkatan pelayanan pendidikan telah dapat meningkatkan cakupan layanan hingga menjangkau daerah pinggiran, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah padat penduduk.

Secara rinci pembangunan pendidikan di Kota Mataram untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan dilihat dari jumlah sekolah dan siswa pada tahun 2010, adalah sebagai berikut: jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta 156 buah (Siswa 43.156 orang), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta 40 buah (Siswa 18.494 orang), sedangkan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) Negeri dan Swasta 42 buah (Siswa 17.255 orang), Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta 11 buah (Siswa 1.627 orang). Data tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah sekolah dan siswa yang bersekolah dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD: 108,98%, SMP : 101,66%, dan SMA : 101,64%.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Mataram, telah pula dilaksanakan berbagai program pembangunan bidang kesehatan yang diprioritaskan pada pelayanan kesehatan dasar, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, Usaha Kesehatan Bermitra Masyarakat (UKBM), penyuluhan kesehatan, dan penerapan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA). Hal ini secara signifikan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Mataram menyongsong "Indonesia Sehat 2015". Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dengan melaksanakan kegiatan TIM TCC Kota Mataram sebanyak 4 kali, Audit Surveillance ISO 9001:2000, pertemuan program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sebanyak 4 kali, pembinaan manajemen puskesmas 4 kali, peningkatan pelayanan program UKGS puskesmas di 160 SD, Skreening Kesehatan Gigi Kelompok Usia Dini sebanyak 46 kelompok.

Di bidang sosial telah dilaksanakan optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) serta upaya-upaya penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditunjukkan dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan berusaha bagi para PMKS. Di bidang ini pula telah dilakukan pembinaan terhadap panti

sosial dan panti jompo (werdha), pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan eks penyandang penyakit sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Mataram melalui pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah PMKS, dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

Di bidang ketenagakerjaan, telah dilakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja melalui BLK, hingga tersedianya pencari kerja yang terdidik dan terlatih, pengembangan informasi bursa tenaga kerja/kesempatan kerja, serta dilakukannya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dengan melaksanakan pengawasan dan bimtek keselamatan dan kesehatan kerja yang hasilnya terjadi peningkatan sekitar 40% perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja.

2.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Potensi Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dilakukan dengan berbagai upaya yang bermuara pada penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM), ketersediaan akses permodalan usaha, peningkatan peluang pemasaran produk UMKM, serta kemandirian koperasi dalam keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, hal ini dapat menjamin adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Mataram.

Permasalahan yang dihadapi program unggulan ini pada tahun 2010, antara lain:

1. Rendahnya akses Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM) pada sumberdaya produktif, permodalan, keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya daya saing produk, serta rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.
2. Lahan pertanian yang semakin sempit dan kualitas SDM petani yang masih rendah, dan belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian.
3. Rendahnya pendapatan nelayan dan produktivitas tangkapan ikan, serta belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil perikanan.

Pencapaian sasaran program unggulan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pada tahun 2010, dilakukan melalui:

No	Sasaran	Evaluasi capaian
1.	Memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil untuk memperluas market produk. Sehingga dengan pengembangan market diharapkan pelaku usaha kecil mampu semakin mandiri.	Jumlah bantuan sebesar Rp. 395 juta untuk 4 koperasi/IKM (bergilir)
2.	Meningkatnya penguasaan teknologi, manajemen dan ketrampilan industri kecil, menengah dan koperasi untuk mencapai kemandirian usaha IKM di Kota Mataram.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebanyak 4 kali
3.	Mengidentifikasi perkembangan IKM di Kota Mataram dan meng- <i>update</i> teknis yang dimiliki masing-masing IKM. Data-data teknis meliputi jumlah produksi, tenaga kerja dan bahan baku.	Penyusunan data IKM sejumlah 2.915 IKM
4.	Tersedia dan terkendalinya kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah dan harga yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.	Pelaksanaan Operasi Pasar sebanyak 4 kali dalam setahun di beberapa pasar
5.	Meningkatnya kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil, menengah dan koperasi sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar dengan standar serta kualitas yang memadai.	Fasilitasi Pengembangan UKM; penyusunan pemetaan dan penilaian KSP/USP Koperasi, serta bimbingan dan konsultasi terhadap 10 koperasi
6.	Terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan unit lembaga mikro dan koperasi.	Pelatihan manajemen usaha kecil terhadap 60 orang pedagang kecil
7.	Tersedianya kebutuhan pangan melalui pembenihan dan intensifikasi ketahanan pangan serta meningkatnya keberdayaan masyarakat petani melalui penataan kelembagaan kelompok masyarakat bidang pertanian.	Terpenuhinya 90% kebutuhan pangan masyarakat sehingga mampu dijangkau oleh masyarakat
8.	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian ekonomi produktif masyarakat pesisir dan nelayan melalui pendayagunaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan dalam rangka penciptaan nilai tambah hasil perikanan sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pesisir dan nelayan.	Pemberdayaan 5 kelompok masyarakat pesisir melalui permodalan, pendidikan dan pelatihan

Kegiatan PER dipusatkan pada penanganan terhadap kelemahan dari segi permodalan. Upaya pemenuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dibidang pertanian, sarana dan prasarana dibidang perikanan dan peternakan terus dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan peningkatan ketrampilan diantaranya melalui pelatihan bagi pelaku KUMKM sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasaran lokal dan regional, juga diadakan pemberian pelatihan bagi generasi muda agar mampu mengisi lowongan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Sebagai hasil akhir pelaksanaan program-program di bidang PER ialah terwujudnya indikator ekonomi daerah yang konsisten. Dilihat dari sisi makro, indikator pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tercermin dari peningkatan PDRB berdasarkan harga berlaku meningkat dari 3.624.337,84 pada tahun 2008 menjadi 4.140.352,68 pada tahun 2009. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram ini diikuti pula dengan penurunan tingkat inflasi yaitu pada tahun 2008 sebesar 13% turun menjadi 3,24 pada tahun 2009. Hal ini mencerminkan pembangunan ekonomi di kota Mataram cukup stabil.

2.2.3 Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka Pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam prioritas Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Perkotaan pada tahun 2010 ialah tersedianya sarana dan prasarana perkotaan yang mendukung kegiatan pembangunan di seluruh penjuru Kota Mataram. Beberapa capaian kinerja yang dicapai ialah penyediaan kuantitas jalan dengan kualitas yang mantap, pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi, pembangunan pasar yang representatif untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan terwujudnya bangunan RSM (Rumah Sakit Mataram) serta gedung DPRD Kota Mataram.

Permasalahan yang dihadapi program unggulan ini pada tahun 2010, antara lain:

1. Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kelas serta fungsi jalan.
2. Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air lainnya sehingga sering terjadi genangan akibat menurunnya kapasitas saluran

drainase yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Disamping itu, masih terdapat talud sungai dan tanggul pengaman pantai yang mengalami kerusakan sebagai akibat banjir/genangan, longsor dan abrasi pantai.

3. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan karena terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan.
4. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.
5. Meningkatnya volume produksi sampah dan menurunnya kapasitas pengangkutan sampah, serta terbatasnya pengelolaan sampah.

Pencapaian sasaran program unggulan Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan pada tahun 2010, dilakukan melalui:

No	Sasaran	Evaluasi Capaian
1.	Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan kondisi baik sepanjang 207,16 km. 2. Luas kawasan kumuh 201,50 Ha 3. Luas jangkauan layanan persampahan 4.904 Ha.
2.	Peningkatan Penataan Kawasan Permukiman dan Pelestarian Lingkungan Hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya prasarana dan utilitas pembangunan Rusunawa. 2. Tersedianya infrastruktur lingkungan permukiman dan perumahan yang memadai pada 50 kelurahan 3. Perbaikan 264 unit rumah yang layak huni bagi masyarakat 4. Peningkatan prasarana jalan lingkungan. 5. Tersedianya sanitasi dasar lingkungan berupa MCK yang dilengkapi dengan septiktank dan SPAL pada 9 lokasi yang dapat menampung pembuangan limbah masyarakat dengan rasio 1 unit : 9 KK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. 6. Terpeliharanya bantaran sungai sepanjang 350 meter untuk melindungi pemukiman penduduk di sekitar bantaran sungai.

3.	Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas-Fasilitas Publik	<p>7. Terlaksananya lanjutan pembangunan konstruksi tanggul pengaman pantai sepanjang 200 meter.</p> <p>8. Terbangunnya saluran drainase lingkungan sepanjang 900 meter.</p> <p>9. Terpeliharanya saluran drainase perkotaan sepanjang 750 meter.</p> <p>10. Pembangunan turap/talud/bronjong sepanjang 500 meter untuk perkuatan bantaran sungai yang rawan terjadinya longsor/erosi.</p> <p>1. Pembangunan Lanjutan 1 unit sarana rekreasi Mataram Water Park.</p> <p>2. Ketersediaan sistem jaringan perpipaan tersier untuk 6 kelurahan, tower penampung air untuk 2 kecamatan dan sumur bor untuk 2 kelurahan.</p> <p>3. Terpeliharanya kondisi prasarana jalan dan jembatan secara rutin selama 1 tahun.</p> <p>4. Pembangunan lanjutan puskesmas Gegutu tahap V, Puskesmas Mataram tahap II, Puskesmas Karang Pule Tahap III, Puskesmas Pejeruk Tahap II, dan Puskesmas Dasan Agung.</p> <p>5. Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Selagalas.</p> <p>6. Pembangunan Polindes Pagutan Tahap II.</p> <p>7. Pembangunan lanjutan gedung sekolah SMKN 8 Mataram, SMA Hang Tuah Mataram, SMK Trisakti Mataram, SMK Pelayaran Mataram dan SMAN 7 Mataram.</p>
----	---	---

2.2.4 Akuntabilitas Anggaran

Penyusunan APBD Kota Mataram dalam Tahun Anggaran 2010 tetap melaksanakan sistem anggaran kinerja yang menitikberatkan pada upaya peningkatan hasil kerja dengan melihat sejauh mana program kegiatan pada masing-masing satuan kerja dapat diakomodir dengan titik tekan kegiatan pada aktivitas pejabat struktural.

Dalam penyusunan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 struktur APBD meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Selain itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 sebesar Rp. 613.908.356.328,- yang didistribusikan pada 43 (SKPD setingkat Badan/Dinas, Kantor/Bagian), 6 Kecamatan dan 50 Kelurahan Unit Kerja lingkup Kota Mataram, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 535.677.233.709,- Selengkapnya data realisasi anggaran tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Realisasi Belanja Daerah
dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010

No	Uraian	Tahun 2010		
		Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	BELANJA	613.908.356.328	535.677.233.709	87,26
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	392.947.539.656	352.727.684.564	89,76
5.1.1	Belanja Pegawai	352.302.802.374	318.945.658.226	90,53
5.1.4	Belanja Hibah	14.830.812.849	12.498.551.856	84,47
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.298.382.000	19.164.518.782	89,98
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	400.000.000	0	0
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.158.800.000	2.027.900.000	96,02
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.956.742.432	46.055.700	2,35
5.2.	BELANJA LANGSUNG	220.960.816.672	182.949.549.145	82,80
5.2.1	Belanja Pegawai	35.280.744.592	31.508.520.393	89,31
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.975.618.853	68.605.383.319	90,17
5.2.3	Belanja Modal	109.704.453.227	82.835.645.433	75,51

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.

Berdasarkan hasil perhitungan akhir anggaran, secara umum kinerja anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai sangat berhasil, dengan capaian nilai kinerja anggaran sebesar **87,26%**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran maka pencapaian kinerja kegiatan Pemerintah Kota Mataram dinyatakan sangat berhasil dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja tidak langsung lebih tinggi 6,69% dibanding belanja langsung.

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak RKPD 2012

Berdasarkan RPJMD Kota Mataram 2010-2015, isu-isu strategis pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota.
2. Berkembangnya permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS).
3. Tingginya angka kemiskinan.
4. Lemahnya kualitas SDM dalam mendorong daya saing daerah.
5. Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat.
6. Lemahnya kualitas dan akses pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, perijinan, kebersihan, sanitasi, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.
7. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu).
9. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung daya saing daerah.
10. Terbatasnya media ekspresi dan ruang apresiasi bagi masyarakat.

Dalam kebijakan program pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 disebutkan bahwa sejalan dengan Visi Kota Mataram yaitu "**Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya**", maka dirumuskan 3 (tiga) program unggulan yang diharapkan akan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap keseluruhan program pembangunan, ketiga program dimaksud adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal.
3. Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat

RKPD Kota Mataram Tahun 2012 disusun dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kota Mataram, sebagai berikut:

1. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, adanya ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta Belum meratanya daya tampung setiap sekolah.
2. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat yang berdampak rendahnya status kesehatan penduduk terutama penduduk kurang mampu, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat kontrasepsi yang diminati.
3. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dengan penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan keperluan pasar kerja.
4. Rendahnya akses KUMKM pada sumberdaya produktif, permodalan, keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya daya saing produk, serta rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.
5. Lahan pertanian yang semakin sempit dan kualitas SDM petani yang masih rendah, dan belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian.
6. Rendahnya pendapatan nelayan dan produktivitas tangkapan ikan, serta belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil perikanan.
7. Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kelas serta fungsi jalan.
8. Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air lainnya sehingga sering terjadi genangan akibat menurunnya kapasitas saluran drainase yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Disamping itu, masih terdapat talud sungai dan tanggul pengaman pantai yang mengalami kerusakan sebagai akibat banjir/genangan, longsor dan abrasi pantai.

9. Rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman karena terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan, dan belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih.
10. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan program antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.
11. Meningkatnya volume produksi sampah dan menurunnya kapasitas pengangkutan sampah, serta terbatasnya pengelolaan sampah.